DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor 5 Tahun 2010

T E N T A N G

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2009 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Maret 2010 merupakan kewajiban Bupati;

b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2009 sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).

6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 28 April 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2009

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2009 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 5 Tahun 2010
Tanggal : 28 April 2010

REKOMENDASI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIREBON TAHUN 2009

A. UMUM

No	Indikator	Rekomendasi
1	Buku LKPJ Bupati Tahun 2009 hanya mencantumkan data-data dan angka dalam bentuk prosentase	Dalam setiap pembuatan buku LKPJ Bupati Tahun 2009 agar dilengkapi dengan data indikator capaian kinerja dalam bentuk angka kuantitatif dan tidak hanya dalam bentuk prosentase saja
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hanya dipegang oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Setelah persetujuan RAPBD menjadi APBD maka setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat menyerahkan Dokumen (DPA-OPD) kepada Anggota DPRD. Hal tersebut dimaksudkan dari awal Anggota DPRD sudah mendapatkan tolok ukur capaian kinerja yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk pembahasan LKPJ berikutnya

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
1	I Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	a Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemda melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi	1 Perlu penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya agar kinerja petugas pengelola pajak dan retribusi lebih optimal 2 Melakukan program inovasi dalam penggalian pajak daerah
	b Pemerintah Daerah merealisasikan pendapatan tahun 2009 sebesar Rp.1.285.732.521.722,00 dari target Rp.1.224.472.186.529,00 atau tercapai over target sebesar 105% dari rencana pendapatan	1 Perlu adanya kajian terhadap potensi pajak pendapatan asli daerah agar OPD penghasil pendapatan akan lebih intensif dalam menggali potensi pendapatan 2 Melakukan koordinasi diantara OPD dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam pengumpulan pajak 3 Meningkatkan monitoring atau pengawasan untuk meminimalisir tingkat kebocoran

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
2	II Pengelolaan Belanja Daerah a Kebijakan umum keuangan daerah tahun anggaran 2009 terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung	1 Perlu memadukan arah kebijakan umum anggaran antara dokumen RKPD dengan APBD sehingga capaian kinerja dari program dan kegiatan pada setiap OPD akan lebih terukur 2 Berupaya mengarah pada pencapaian tingkat kemandirian atau otonomi yang nyata dan utuh dengan proporsi PAD dalam APBD minimal 20 %
	b Pemerintah Daerah merealisasikan anggaran belanja daerah th.2009 sebesar Rp.1.212.197.559.304,00 dari target anggaran belanja daerah sebesar Rp.1.260.725.055.265,00 atau 96,15 % dari rencana anggaran belanja	1 Kinerja penyerapan belanja daerah tahun 2009 mencapai 96,15 % agar dapat ditingkatkan untuk tahun ke depan 2 Tata kelola keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektiv, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
3	URUSAN PENDAPATAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Pemutakhiran data wajib pajak agar diperbaharui secara terus menerus untuk memenuhi pencapaian target penerimaan pajak daerah 2 Menjalin koordinasi dan membangun jaringan kerjasama secara sinergis antara OPD penghasil pendapatan daerah 3 pemberian reward kepada Wajib Pajak yang membayar pajak teoat waktu

C. URUSAN WAJIB

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
I	**URUSAN PENDIDIKAN**	
1	Dinas Pendidikan	
	a Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1 Pemerintah Daerah agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana alokasi bidang pendidikan serta adanya kejelasan tentang indikator capaian kinerjanya 2 Pemerintah Daerah agar melakukan pendataan tentang ruangan kelas yang rusak (sedang/berat) dan yang sudah diperbaiki 3 Perlu dibuat kebijakan tentang pungutan yang dilakukan sekolah kepada masyarakat agar tidak bertentangan dengan kebijakan Pembebasan Dana Sumbangan (PSD) bulanan

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
		4 Mengingat masih banyaknya penyelewengan dana BOS, diharapkan agar sekolah yang menerima dana BOS dilakukan audit oleh BPK
	b Program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan	1 Agar tidak memaksakan program RSBI mengingat tenaga pengajar yang ada saat ini juga belum memiliki standar RSBI 2 Melakukan penilaian secara periodik terhadap guru yang berprestasi serta memberikan reward 3 Melakukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru secara reguler
II	**URUSAN KESEHATAN**	
2	Dinas Kesehatan	
	a Program upaya kesehatan masyarakat	1 Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pemegang kartu jamkesmas ataupun jamkesda 2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang sehat 3 Peningkatan sumber daya manusia di puskesmas melalui program pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi dokter umum menjadi dokter spesialis
	b Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	1 Sarana di puskesmas agar ditingkatkan, khususnya yang terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan 2 Meningkatkan koordinasi antara rumah sakit dengan puskesmas/pustu khususnya untuk pasien rujukan
	c Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak, agar dilakukan program-progam terobosan yang menyentuh ke sasaran langsung
3	BRSUD Arjawinangun Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS, RS Jiwa, RS paru-paru, RS mata	1 Menuntaskan pembangunan relokasi BRSUD Arjawinangun 2 Mengusahakan perubahan status BRSUD Arjawinangun dari tipe C ke tipe B
4	BRSUD Waled	
	a Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS, RS Jiwa, RS paru-paru, RS mata	Melakukan lanjutan pembangunan instalasi bedah sentral tahap III di BRSUD Waled mengingat kebutuhan rumah sakit sebagai tipe B
	b Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS	Melakukan penambahan daya listrik untuk BRSUD waled mengingat bertambahnya peralatan yang ada

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
III	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**	
5	Dinas Bina Marga Program pembangunan infrstruktur pedesaan	1 Melakkan kajian tentang pembangunan infrastruktur pedesaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku 2 Melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3 Menindaklanjuti kesepakatan MoU dengan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kerusakan jalan kabupaten dan jalan poros desa yang diakibatkan oleh dampak pembangunan jalan tol di wilayah timur
6	Dinas Cipta Karya Program pengendalian pemanfaatan ruang	1 Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon 2 Menindak tegas baik perseorangan maupun perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak sesai dengan rencana tata ruang yang ada
7	Dinas PSDA Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Pemerintah Daerah harus secepatnya melakukan tindakan tegas terhadap pelaku bisnis yang melanggar sempadan sungai terutama pada daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan daerah perbatasan baik dengan Kabupaten Kuningan maupun Kota Cirebon 2 Perlu adanya kajian analisis yang komprehensif mengenai kawasan cagar budaya yang menjadi aset Pemerintah Daerah
IV	**URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	
8	Bappeda Program perencanaan pembangunan daerah	1 Perlunya perubahan metode penjaringan aspirasi masyarakat dan penyusunan program dalam Musrenbang agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2 Proses penganggaran ke depan agar tidak lagi berbasis pagu anggaran tetapi berbasis kebutuhan dan mempertimbangkan kawasan/ zona atau berbasis regional serta mengutamakan skala prioritas daripada pemerataan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan lebih terpadu, bermanfaat dan berkelanjutan

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
V	**URUSAN PERHUBUNGAN**	
9	Dinas Perhubungan Program pengendalian dan pengamana lalu lintas	1 Melakukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas khususnya di sekitar pasar dan jalan desa 2 Meningkatkan koordinasi diantara pengendali dan pengamanan lalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan dan kepolisian guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas 3 Menerapkan peraturan lalulintas secara tegas
VI	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**	
10	BLHD Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1 Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan 2 Memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku perusak lingkungan 3 Bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan 4 Melakukan relokasi terhadap usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan sepeti pencemaran air, limbah dan lain-lain
VII	**URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	
11	Disdukcapil	
	a Program penyuluhan administrasi kependudukan	1 Mensosialisasikan secara maksimal fungsi layanan administrasi kependudukan melalui berbagai media agar masyarakat mengetahui secara persis tatacara dan prosedur pembuatan dan layanan produk kependudukan 2 Meningkatkan peran Ketua RT untuk meningkatkan kesadaran warganya untuk memiliki identitas penduduk
	b Program penataan administrasi kependudukan	1 Meningkatkan sumberdaya manusia khususnya operator komputer agar dapat memberikan pelayanan kependudukan secara maksimal 2 Meminimalisir potensi kerusakan server komputer yang disebabkan oleh cuaca maupun human eror agar fungsi layanan kependudukan khususnya KTP bisa terlaksana lebih cepat

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
VIII	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
12	BPPKB Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai UU tentang KDRT melalui kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kab Cirebon 2 Peningkatan perhatian terhadap kader posyandu yang ada di desa dengan memberikan bantuan berupa dana insentif
IX	**URUSAN SOSIAL**	
13	Dinas Sosial Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1 Melaksanakan program dan kegiatan yang berpihak kepada rakyat miskin 2 Melakukan koordinasi dengan OPD terkait misalnya Bappeda untuk menyusun dan melaksanakan program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon 3 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih cepat tanggap dalam mengatasi masalah sosial misalnya bencana alam, banjir dan lain-lain
X	**URUSAN KETENAGAKERJAAN**	
14	Disnakertrans Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Memaksimalkan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dengan melakukan sosialisasi manfaat yang ada di BLK 2 Meningkatkan intensitas kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini 3 Meningkatkan jumlah peserta pencari kerja untuk dilatih keterampilan 4 Memonitor secara ketat tentang UMK pada setiap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cirebon dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mentaati peraturan 5 Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dan aparat desa terkait dengan perlindungan tenaga kerja asal Cirebon yang bekerja di luar negeri

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
XI	**URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	
15	Dinas Koperasi & UMKM	
	a Program peningkatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1 Menyusun database UMKM dan skala prioritasnya 2 Mendorong proses produksi usaha mikro kecil menengah seperti pengrajin batik, gerabah, lukisan kaca, sandal kebarepan agar memiliki daya saing di pasaran 3 Meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses pasar dan pangsa pasar 4 Memberikan kemudahan pinjaman bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya
	b Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro menengah	1 Peningkatan akses permodalan bagi beberapa koperasi dan UMKM 2 Pendistribusian kredit lunak dan kredit program tanpa agunan dengan pembinaan dan pengawasan dalam rangka membantu usaha mikro menengah agar tepat sasaran
	c Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan kepada koperasi yang berprestasi dalam rangka memacu pengembangan kegiatan usaha koperasi 2 Meningkatkan manajemen organisasi koperasi yang sehat dan efisien 3 Memberikan pelatihan secara reguler kepada pengurus dan pengelola koperasi
XII	**URUSAN PENANAMAN MODAL**	
16	BPPT	
	a Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1 Kegiatan promosi agar lebih selektif serta perlu terus ditingkatkan jalinan koordinasi antara pelaku investasi sehingga para investor merasa aman dan menguntungkan berinvestasi di Kabupaten Cirebon 2 Melakukan deregulasi dalam rangka membuka akses investasi di Kab Cirebon
	b Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1 Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian stimulus dalam rangka peningkatan penanaman modal khususnya usaha kecil menengah (UKM) 2 Melakukan kajian untuk memotret peluang investasi dan ditindaklanjuti untuk menggairahkan investor menanamkan modal di Kabupaten Cirebon

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
	c Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Perlunya penanganan kasus pengaduan yang lebih komprehensif sehingga semua hambatan prosedural maupun teknis dapat diatasi 2 Mengawasi dan mengamankan kebijakan kepala daerah
	d Program penataan peraturan perundang-undangan	1 Memberikan fasilitas kepada pelaku usaha terkait dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha akan pentingnya perijinan khususnya maraknya toko modern/minimarket 2 Membuat regulasi tentang minimarket bahwa minimarket berkewajiban mengakomodir ± 40 % dari produk lokal
XIII	**URUSAN KEBUDAYAAN**	
17	Disbudparpora Program pengembangan pemasaran pariwisata	1 Pengembangan obyek wisata di Kabupaten Cirebon agar terus ditingkatkan dengan melibatkan pihak ketiga dan mendatangkan para investor 2 Bidang kesenian dan para senimannya serta bidang olahraga dan para atletnya agar terus dikembangkan dan ditingkatkan pembinaannya agar dapat berprestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional
XIV	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**	
18	Badan Kesbang Linmas Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	1 Agar Pemda memiliki database eks warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Cirebon secara lengkap 2 Agar Pemda membangun jaringan informasi intelejen secara lengkap dan terorganisir dengan lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan 3 Agar Pemda memiliki sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, halangan dan tantangan terhadap kondusifitas politik Kabupaten Cirebon
19	Satpol PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Agar Pemda menata hubungan dengan seluruh warga masyarakat Kab Cirebon melalui berbagai pendekatan persuasif dengan tetap menjaga profesionalitas kerja

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
		2 Agar Pemda bisa menempatkan para aparatur Satpol PP sebagai salah satu aset yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Cirebon 3 Memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pengamanan dan pengawalan untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawalan
XV	**URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**	
20	Sekretariat Daerah	
	a Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	1 melakukan pebaikan terhadap manajemen pelayanan sektor publik dan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat 2 Menata sistem "bawah kendali operasi" di berbagai unit kerja dengan baik 3 Memaksimalkan peran para camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meminimalisir potensi konflik yang disebabkan oleh sengketa status kepemilikan tanah
	b Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (BKPPD)	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas aparatur di seluruh tingkatan dan unit kerja
	c Program penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kerangka kerja pencegahan kebocoran sektor keuangan daerah dari sisi kejelasan dan kepastian hukum
	d Program pembinaan dan pengembangan aparatur (BKPPD)	1 Menerapkan sistem analisa beban kerja dan sistem analisa kinerja paratur dalam proses rekruitmen dan distribusi aparatur agar tercipta para aparatur yang handal dan profesional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 2 Menutup penambahan jumlah tenaga honorer yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan memberatkan keuangan daera
	e Program kerjasama informasi dan media masa	1 Memaksimalkan tingkat ketersediaan informasi dan transparansi kebijakan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon 2 Mensosialisasikan seluruh regulasi mengenai administrasi pertanahan dalam berbagai media yang bisa diakses secara luas oleh warga Kabupaten Cirebon

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
	f Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi secara baik dan terstruktur sesuai dengan kondisi otonomi daerah yang ada saat ini
	g Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Menyelesaikan berbagai kasus dan sengketa administrasi kepemilikan tanah di Kabupaten Cirebon terutama tanah-tanah yang diklaim sebagai milik pemerintah daerah 2 Membangun layanan sertifikasi tanah dengan cepat, tepat dan bebas dari berbagai pungutan liar 3 Menyelesaikan persoalan sengketa aset tanah dan bangunan kantor Disnakertrans yang terletak di Kota Cirebon dengan baik dan maksimal 4 Memonitor proses jual beli tanah milik pemerintah desa dengan baik sesuai regulasi dan kapasitas yang dimiliki 5 Menjadi fasilitator dalam setiap sengketa administrasi kepemilikan tanah di Kabupaten Cirebon 6 Membeli dan mengganti status kepemilikan tanah yang hendak dibangun sarana maupun prasarana milik Pemda Kabupaten Cirebon agar tidak memberatkan keuangan daerah di masa yang akan datang
	h Penataan daerah otonomi baru	1 Mempertahankan setiap jengkal tanah yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Cirebon 2 Melakukan proses pembangunan dan penetapan batas-batas wilayah perbatasan secara konkrit, cepat dan tepat sasaran secara maksimal
XVI	**URUSAN KETAHANAN PANGAN**	
21	BKP5K Program peningkatan ketahanan pangan	1 Perlu membangun sistem penyaluran dana secara transparan dan sesuai peruntukan bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian 2 Pemanfaatan lahan-lahan tidur atau pekarangan rumah dengan tanaman konsumsi keluarga, tanaman hias, apotek hidup dan warung hidup 3 perlu mengupayakan secara terpadu dan cermat mengenai pendistribusian beras raskin maupun pendampingan subsidi agar tepat sasaran

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
XVII	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	
22	BPMPD Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Meminimalisir potensi konflik yang terjadi sebagai akibat dari proses pelaksanaan agenda pemilihan kuwu 2 Mengembangkan program-program pembangunan di desa yang berada di wilayah perbatasan melalui mekanisme program PNPM mandiri perdesaan maupun program lainnya secara adil, merata dan berkesinambungan 3 Menyikapi secara serius persoalan pendistribusian dana ADD karena selain banyak berkembang isu-isu yang sangat provokatif dan bisa berpotensi kepada gangguan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Cirebon 4 Memberikan proses pembelajaran dan pelatihan kepada para Sekdes yang baru saja diangkat menjadi PNS secara simultan dan berkelanjutan agar bisa menciptakan sekretaris desa yang handal dan profesional di bidangnya 5 Membuat regulasi baru mengenai aturan dan tata cara pemilihan kuwu terutama yang menyangkut aturan quorum dalam pemilihan kuwu 6 Bekerjasama dengan pihak swasta dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program CSR sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini 7 Meningkatkan kualitas dan standar baku sarana dan prasarana kantor desa
XVIII	**URUSAN KEARSIPAN**	
23	Kantor Kearsipan dan Dokumen Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1 Membangun sarana arsip dan dokumen yang terkomputerisasi secara modern guna meminimalisir kebutuhan akan ruang dan tempat yang ada saat ini 2 Memiliki database arsip-arsip berharga dan bernilai sejarah tinggi yang menjadi milik Kabupaten Cirebon 3 Membangun jaringan informasi kearsipan yang terkomputerisasi dan terintegrasi penuh serta bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
XIX	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
24	Dinas Kominfo Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1 Membangun jaringan informasi dan komunikasi antar SKPD, kecamatan hinga tingkat desa dengan berbagai media teknologi informasi dan komunikasi kontemporer 2 Menyerahkan seluruh tata kelola situs Pemkab Cirebon yang ada di Bagian Humas Setda saat ini kepada pihak Dinas Kominfo agar bisa dimaksimalkan dan tersentralisir dengan baik 3 Membangun sarana prasarana press confrence room modern agar proses sosialisasi nilai-nilai politik pemerintah daerah bisa dilaksanakan secara layak dan terintegrasi 4 Membangun sarana dan prasarana e-procurement dalam proses lelang barang dan jasa secara baik dan bisa diakses secara luas 5 Meningkatkan peran Dinas Kominfo sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat
XX	**URUSAN PERPUSTAKAAN**	
25	Kantor Perpustakaan Daerah Program pengembangan buday baca dan pembinaan perpustakaan	1 Menyediakan perpustakaan dilokasi yang baru dan dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat Kabupaten Cirebon 2 Meningkatkan jumlah buku sebagai sarana informasi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon 3 Membangun sarana wifi dan warung internet di lingkungan Kantor Perpustakaan Daerah dan bisa diakses dengan mudah oleh warga masyarakat Kabupaten Cirebon 4 Memberikan tambahan unit kendaran operasional perpustakaan keliling guna membudayakan dan menambah minat baca warga

D. URUSAN PILIHAN

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
I	**URUSAN PERTANIAN**	
1	Distanbunnakhut	
	a Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan	1 Melakukan kegiatan promosi produk pertanian dan perkebunan baik dalam bentuk pameran maupunn dalam media elektronik lainnya (website) 2 Melakukan mediasi antara para petani dengan pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran produk
	b Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian tentang penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian 2 Memperkenalkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan
	c Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1 Meningkatkan produksi padi petani dan mengendalikan harga dasar beras sehingga dapat meningkatkan penghasilan petani 2 Melakukan pengawasan yang ketat dan efektif terhadap pelaksanan penyaluran pupuk bersubsidi 3 Optimalisasi peran penyuluh pertanian / perkebunan secara terus menerus dan terprogram 4 Memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier agar produksi pertanian meningkat 5 Untuk mengembalikan tekstur tanah pertanian diharapkan Pemda dapat mengarahkan masyarakat petani untuk menggunakan pupuk organik.
	d Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1 Melakukan kegiatan penyuluhan yang intensif tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2 Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan peternakan
	e Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1 Membantu pelaku usaha peternakan untuk mengidentifikasi pasar produk peternakan 2 Membantu pelaku usaha peternakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memaksimalkan produksi peternakan 3 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan para peternak terutama ternak sapi sehingga para peternak dapat didorong untuk meningkatkan produksinya 4 Meningkatkan produksi rumah potong hewan dan penataan pasar hewan

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
	f Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1 Melakukan kegiatan penyuluhan peternakan tentang penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas peternakan 2 Memperkenalkan teknologi tepat guna 3 Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pembudidayaan komisi
	g Program rehabilitasi hutan dan lahan	1 Melakukan gerakan penghijauan lahan gundul 2 Meningkatkan pengawasan perlindungan hutan 3 Meningkatkan pengawasan terhadap perijinan dan perubahan tata guna lahan 4 Mempertahankan lahan terbuka hijau baik secara besaran luasnya maupun distribusinya
	i Program perencanaan dan pengembangan hutan	1 Menerapkan kebijakan kehutanan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan 2 Menerapkan sanksi secara tegas terhadap perubahan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
II	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
	2 Dislakan	
	a Program pembinaan ekonomi masyarakat pesisir	1 Difersifikasi pekerjaan bagi masyarakat nelayan 2 Melakukan kegiatan ekonomi lokal bagi istri-istri nelayan 3 Pelatihan ekonomi lokal baik yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam program meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat pesisir
	b Program pendampingan pada kelompok usaha perikanan	1 Melakukan pelatihan kegiatan usaha perikanan 2 Memberikan bantuan modal usaha produktif 3 Mendorong peningkatan produksi penangkapan ikan sebesar 1 % dari tahun sebelumnya
	c Program pembinaan dan pemeliharaan TPI	1 Melakukan pembinaan administratif bagi pengelola TPI 2 Peningkatan sarana dan prasarana TPI 3 Pemberian keterampilan kepada pemuda tentang kewirausahaan
	d Program pameran dan bazar produksi perikanan	1 Mengikuti pameran dan bazar produksi perikanan ke berbagai daerah dengan mengikutsertakan para pelaku usaha 2 Memberikan keterampilan dalam bentuk kemasan maupun kualitas produksi hasil ikan olahan

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
	e Program pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	1 Meningkatkan produksi ikan budidaya 2 Pembekalan keterampilan kelompok budidaya ikan
	f Program pembinan dan pengembangan perikanan	1 Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana perikanan 2 Pengembangan Balai Benih Ikan yang memenuhi syarat 3 Penyelesaian dampak pembangunan PLTU terhadap pembudidaya kerang hijau
	g Program operasional UPTD Benih Ikan di Dukupuntang	1 Optimalisasi UPTD benih ikan di Dukupuntang 2 Kejelasan status tanah di UPTD Benih Dukupuntang 3 Peningkatan sarana dan prasarana balai benih
	h Program operasional dan pemeliharaan UPTD PPI Gebang Mekar	1 Peningkatan sarana dan prasarana PPI 2 Optimalisasi sarana PPI yang telah ada 3 Pengembangan PPI Gebang Mekar menjadi sentra perikanan di Kabupaten Cirebon
	i Program pendampingan pada kelompok nelayanan perikanan tangkap	1 Memberikan jaminan sosial bagi nelayan 2 Penyuluhan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan 3 Pemberian insentif atau penghargaan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan 4 Mendorong nelayan untuk menjual ikannya di TPI yang ada 5 Pengerukan sungai dan muara yang dangkal 6 Meningkatkan produksi ikan tangkap minimal sebesar 1 %
	j Program pengelolaan laut bersama masyarakat	1 Membuat dan/atau meningkatkan kelompok nelayan untuk mengawasi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 2 Bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi laut Indonesia dari nelayan asing 1 Perlu penataan lingkungan di pasar ikan
	k Program pengelolaan lingkungan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat (PLPBPM)	2 Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengelola lingkungan pesisir 3 Terfasilitasinya akses permodalan bagi para nelayan
	l Program pemeliharaan rutin/berkala kapal keruk	1 Pengoperasian kapal keruk dioptimalkan 2 Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (sewa)

No	Program kerja Pemerintah Daerah	Rekomendasi
III	**URUSAN PERDAGANGAN**	
3	Dinas Perindag	
	a Program perlindungan konsumen dan pengamana perdagangan	Melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen serta meningkatkan pengawasan peredaran barang yang mengandung barang berbahaya
	b Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1 Melakukan peningkatan promosi produk unggukan daerah Kabupaten Cirebon dan peningkatan pasar yang lebih luas 2 Melakukan kerjasama dengan kabupaten/ kota dalam rangka promosi produk unggulan daerah
	c Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1 Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan pedagang asongan melalui penyuluhan secara kontinyu agar tidak menggunakan sarana umm untuk berjualan terutama di pasar tradisional 2 Memfasilitasi aspek permodalan
	d Program pengembangan industri kecil menengah	1 Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bagi industri kecil menengah dalam meningkatkan aneka makanan olahan 2 Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan kegiatan sentra-sentra industri kecil menengah 3 Memfasilitasi aspek permodalan 4 Adanya jaminan pemasaran hasil produksi

E. LAIN-LAIN

No	Bidang	Rekomendasi
1	Statistik	1 Mendukung dan mensukseskan program sensus penduduk tahun 2010 di Kabupaten Cirebon 2 Membangun sistem statistik yang baik agar dapat menyediakan data statistik yang memiliki keakuratan dan validitas yang tinggi 3 Memberikan informasi data statistik khususnya dalam bidang ekonomi yang berguna untuk menarik investor dari luar
2	Program dan kegiatan Perusahaan Daerah a PDAM	1 Mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum yang difokuskan pada masyarakat miskin khususnya di wilayah pantura dan perdesaan 2 Meminimalisir tingkat kebocoran air